



BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2017 ini bisa diselesaikan pada waktunya.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pertanggungjawaban yang memuat gambaran keberhasilan baik makro maupun mikro, langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan, dan kendala dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, laporan kinerja ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya good governance di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Kinerja tersebut diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, telah dapat tercapai kemajuan yang cukup signifikan. Meskipun sangat disadari bahwa dalam laporan ini masih dijumpai sejumlah kekurangan, namun diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang tulus kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2017 ini.

Jakarta,

**KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK**



Ir. BAMBANG PRIHARTONO, MSCE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19600825 198811 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Dan Fungsi Unit Kerja	2
1.3 Sumber Daya Manusia Unit Kerja	5
1.4 Potensi, Isu Strategis Dan Permasalahan	7
1.5 Sistematika Laporan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	12
2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	18
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja	18
3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 terhadap Target Revisi PK Tahun 2017	18
3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2017 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2017	19
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2017 Dalam Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019	20
3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017	20
3.2.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya	21

3.2.6	Capaian Keberhasilan Kinerja Unit Kerja Lainnya	22
3.3	Realisasi Anggaran	22
3.3.1	Alokasi Total Anggaran Tahun 2017	31
3.3.2	Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja	32
BAB IV	PENUTUP	32
4.1	Kesimpulan	33
4.1.1	Pencapaian Kinerja Unit Kerja	33
4.1.2	Prestasi Unit Kerja Tahun 2017	35
4.2	Saran Tindak Lanjut	36
4.2.1	Perencanaan Kinerja	36
4.2.2	Pengukuran Kinerja.....	36
4.2.3	Pelaporan Kinerja.....	36
4.2.4	Evaluasi Kinerja.....	36
4.2.5	Capaian Kinerja	36
BAB V	LAMPIRAN.....	37
5.1	Lampiran I Capaian Tahun 2017.....	37
5.2	Lampiran II Peraturan Perundangan yang Dilegalkan Tahun 2017 (jika diperlukan).....	37
5.3	Lampiran III Rekapitulasi Realisasi Daya Serap Per Triwulan Tahun Anggaran 2017.....	38
5.4	Lampiran IV Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017.....	42
5.5	Lampiran V Perjanjian Kerja Tahun 2017.....	43
5.6	Lampiran VI Perjanjian Kerja Revisi Tahun 2017.....	44

DAFTAR TABEL

TABEL I. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon BPTJ.....	5
TABEL I. 2 Jumlah pegawai menurut kualifikasi pendidikan	6
TABEL II. 1 Rencana Kerja Tahun 2017 BPTJ.....	12
TABEL III. 1 Perbandingan Capaian dan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2017	19
TABEL III. 2 Perbandingan Capaian Terhadap Target Renstra Kemenhub Tahun 2017.....	20
TABEL III. 3 Capaian Kinerja Direktorat Perencanaan dan Pengembangan	22
TABEL III. 4 Capaian Kinerja Direktorat Prasarana	23
TABEL III. 5 Capaian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan	25
TABEL III. 6 Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Belanja.....	31
TABEL III. 7 Alokasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja	31
TABEL III. 8 Alokasi Anggaran Berdasarkan Unit Kerja Eselon II	32
TABEL III. 9 Dana Tidak Terserap Tahun Anggaran 2017	32
TABEL IV. 1 Capaian Sub Sektor BPTJ	35

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Sumber Lampiran Peraturan Menteri 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTJ	4
GAMBAR I. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon BPTJ	6
GAMBAR I. 3 Grafik Jumlah pegawai Tiap Kualifikasi Pendidikan	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, maka disusunlah Laporan Kinerja Badan Pengelola Transportasi Tahun 2017. Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek selama tahun 2017, berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan di awal pembentukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2017. Komitmen dimaksud merupakan fokus Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang di dalam rumusan tujuan dan sasaran. Laporan Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2017 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan maupun kekurangan keberhasilan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama tahun anggaran 2017 berdasarkan tujuan dan sasaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2017 adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2017 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Perhubungan yang telah ditetapkan, melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2016-2019.

Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategis dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Capaian kinerja (*performance result*) tahun anggaran 2017 dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) yang telah disesuaikan dengan DIPA T.A. 2017 berikut revisinya, sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Analisis atas capaian kinerja tahun 2017 terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

1.2 Tugas Dan Fungsi Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Pasal 2 Kedudukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dipimpin oleh Pejabat Tinggi Madya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

1. Tugas BPTJ

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Pasal 3, BPTJ mempunyai tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegritas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

2. Fungsi BPTJ

Dalam melaksanakan tugas, sesuai Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Pasal 4, BPTJ menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berdasarkan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Jarata, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- d. Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam rangka pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- e. Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan atau manajemen dalam rangka pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- f. Penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi dalam Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi yang tidak termasuk dalam rencana umum dan rencana program kegiatan transportasi dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

- g. Penyiapan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- h. Pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal;
- i. Pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (feeder service);
- j. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum dan program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- k. Melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya; dan
- l. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

3. Struktur Organisasi BPTJ

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Pasal 4, susunan Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas: melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPTJ.

b. Direktorat Perencanaan dan pengembangan

Direktorat Perencanaan dan pengembangan mempunyai tugas: melaksanakan penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan dan koordinasi pembiayaan, pemberian fasilitas teknis, koordinasi dan sinkronisasi rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi serta evaluasi dan pelaporan.

c. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan

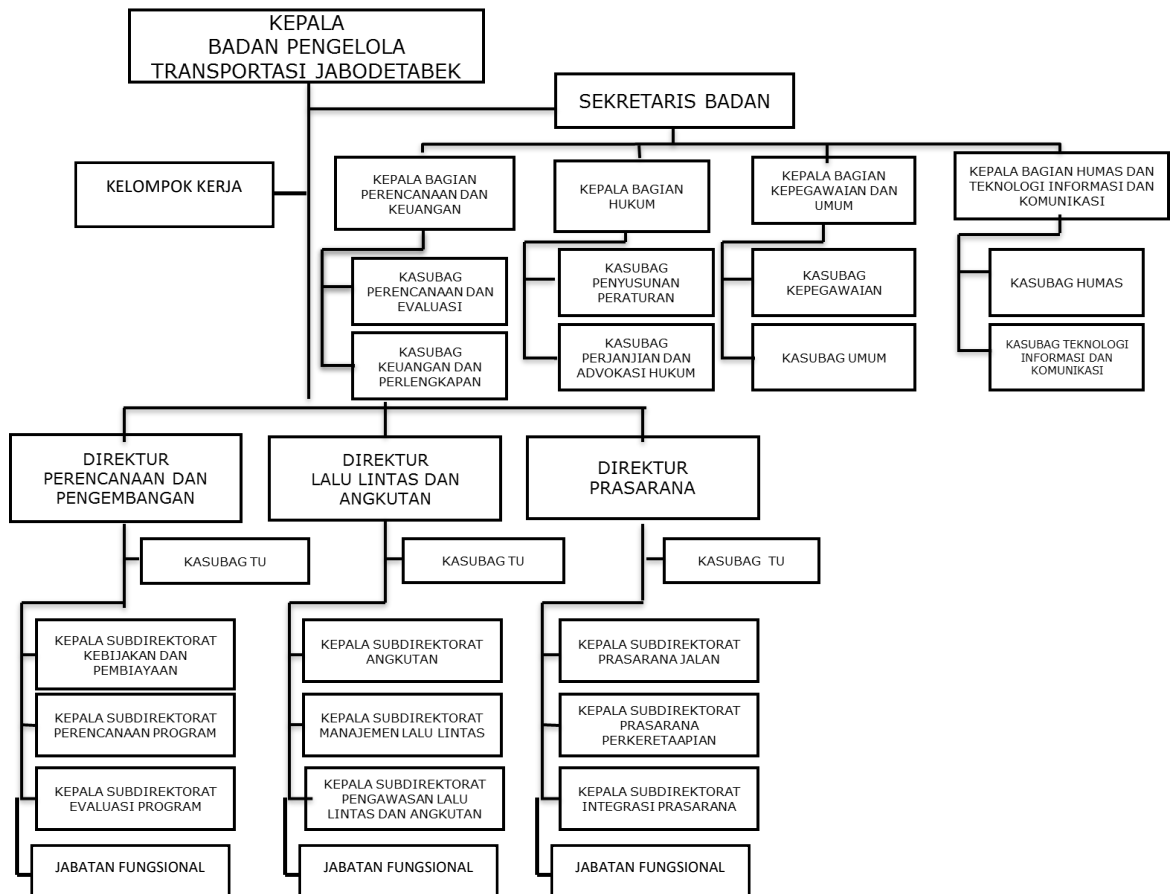
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas: Melaksanakan fasilitasi teknis, anajemen peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum, pengembangan dan peningkatan sarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum, permintaan lalu lintas, pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal, pemberian perijinan angkutan umum yang melampaui batas propinsi wilayah Jakarta,

Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, serta koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi terkait dengan lalu lintas dan angkutan.

d. Direktorat Prasarana

Direktorat Prasarana mempunyai tugas: Melaksanakan fasilitasi teknis, manajemen dalam rangka pengembangan dan peningkatan prasarana penunjang angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dan pelaksanaan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi terkait dengan prasarana.

Struktur Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terdiri dari :



GAMBAR I. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Sumber Lampiran Peraturan Menteri 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTJ

Visi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015 – 2019, yaitu “Terwujudnya peningkatan pelayanan, keterpaduan, konektivitas dan mobilitas orang dan barang/ jasa transportasi di wilayah Jabodetabek.” dengan misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa transportasi di wilayah Jabodetabek;

2. Melakukan fasilitasi teknis, pembiayaan dan atau manajemen dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan, pengembangan sarana dan prasarana penunjang angkutan umum, serta pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jabodetabek;
3. Melakukan penyusunan rencana program, kebutuhan anggaran, regulasi dan kebijakan serta rekomendasi penataan ruang dan kebijakan perizinan yang berorientasi angkutan umum massal dan terintegrasi di wilayah Jabodetabek.

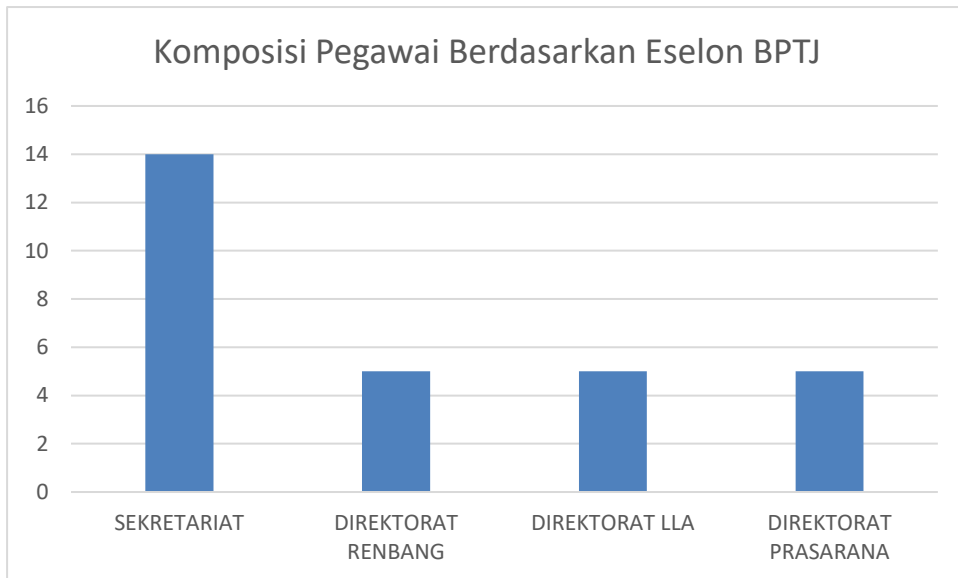
1.3 Sumber Daya Manusia Unit Kerja

Dalam menjalankan tugasnya, pada tahun 2017 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek didukung oleh 103 orang pegawai, komposisi pegawai Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek disajikan sebagaimana tabel berikut:

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon BPTJ

TABEL I. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon BPTJ

NO.	UNIT	ESELON								JUMLAH
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
1	SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA TRANS JABODETABEK	1	0	1	0	4	0	8	0	14
2	DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	0	0	1	0	3	0	1	0	5
3	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	0	0	1	0	3	0	1	0	5
4	DIREKTORAT PRASARANA	0	0	1	0	3	0	1	0	5
JUMLAH		1	0	4	0	13	0	11	0	29

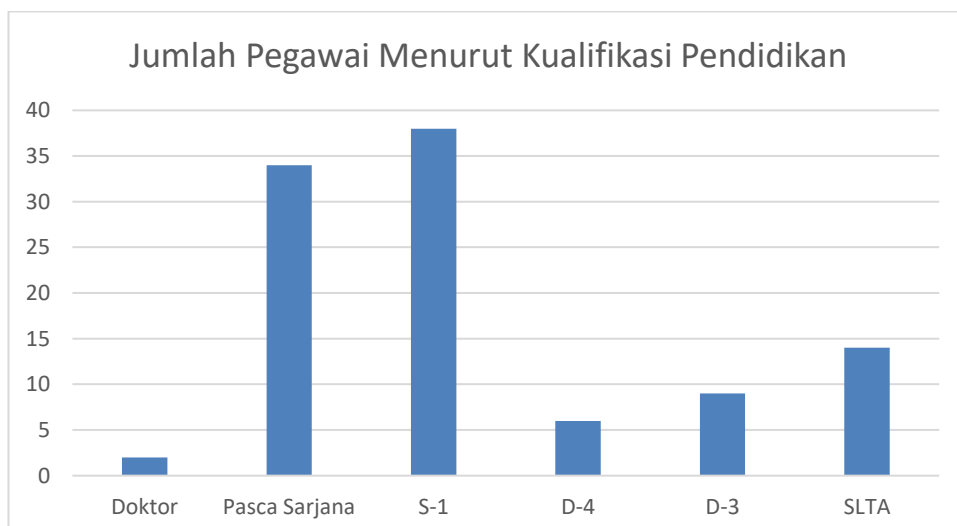


GAMBAR I. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon BPTJ

2. Komposisi pegawai menurut kualifikasi pendidikan

TABEL I. 2 Jumlah pegawai menurut kualifikasi pendidikan

NO.	UNIT	PENDIDIKAN						JUMLAH
		Doktor	Pasca Sarjana	S-1	D-4	D-3	SLTA	
1	SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	0	14	22	0	4	7	47
2	DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	0	8	3	1	2	3	17
3	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	1	7	4	3	2	2	19
4	DIREKTORAT PRASARANA	1	5	9	2	1	2	20
JUMLAH		2	34	38	6	9	14	103



GAMBAR I. 3 Grafik Jumlah pegawai Tiap Kualifikasi Pendidikan

1.4 Potensi, Isu Strategis Dan Permasalahan

Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Peraturan Presiden No. 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek bahwa mobilitas masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi merupakan pergerakan ulang-alik harian, sehingga layanan transportasi harus terintegrasi dan menerus, tidak terkotak-kotak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan. Dalam rangka peningkatan pelayanan, keterpaduan, konektivitas dan mobilitas pergerakan orang dan barang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pengelolaan sistem transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi secara terintegrasi. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah pergerakan kendaraan bermotor yang terus meningkat, untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, diperlukan layanan angkutan massal yang terintegrasi baik antar moda maupun antar wilayah. Pengembangan dan pengelolaan sistem transportasi yang efektif dan efisien akan dapat memperbaiki kondisi saat ini seperti penanganan masalah kemacetan, polusi, biaya tinggi, dan tingkat kecelakaan, sehingga diperlukan penanganan khusus.

Oleh karenanya pengelolaan transportasi Jabodetabek dalam 4 tahun ke depan harus secara sinergis memperhatikan berbagai perkembangan di sektor transportasi secara keseluruhan, sehingga diperoleh kinerja dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Berikut ini disampaikan beberapa perkembangan lingkungan strategis di sektor transportasi nasional yang perlu diperhatikan:

1. Perimbangan Pangsa Angkutan Antar Moda (Modal Share)

Indonesia sebagai negara kepulauan yang tersebar dengan lebih dari 17.000 pulau hanya bisa terhubung dengan baik melalui sistem transportasi multimoda, tidak ada satu moda pun yang bisa berdiri sendiri. Masing-masing moda mempunyai keunggulan di bidangnya masing-masing. Pemerintah berfungsi untuk mengembangkan keseluruhan moda tersebut dalam rangka menciptakan sistem transportasi yang efisien, efektif dan dapat digunakan secara aman dapat menempuh perjalanan dengan cepat dan lancar.

Jaringan transportasi dapat dibentuk oleh moda transportasi yang terlibat yang saling berhubungan yang terangkai dalam Sistem Transportasi Nasional (Sistranas). Masing-masing moda transportasi memiliki karakteristik teknis yang berbeda dan pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisi geografis daerah layanan. Untuk wilayah perkotaan seperti Jabodetabek dimana penduduknya memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi, dibutuhkan angkutan massal yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Moda transportasi yang paling sesuai untuk kondisi tersebut adalah jalan dan kereta api yang berbasis angkutan massal.

Pada kenyataannya, berdasarkan analisis atas data survei ATTN 2011 yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, sampai dengan saat ini moda jalan masih sangat dominan di Indonesia, peran angkutan moda jalan mencapai 85% untuk pergerakan

penumpang dan 91% untuk pergerakan barang. Sedangkan peran moda kereta api masih sangat marginal, yakni 3,18% untuk angkutan penumpang dan 0,16% untuk angkutan barang. Mengingat bahwa kapasitas kereta api dalam sekali perjalanan lebih besar dibandingkan dengan angkutan jalan, maka hal tersebut menyebabkan munculnya kemacetan di sejumlah ruas jalan nasional antar kota, khususnya pada ruas yang berbatasan dengan kawasan perkotaan yang sudah padat. Sedangkan jaringan jalan perkotaan mengalami gejala kemacetan yang lebih parah di mana data Bina Sistem Transportasi Perkotaan (2014) menyebutkan di 10 kota termacet di Indonesia kecepatan lalu lintasnya berkisar antara 20-30 km/jam.

Di masa mendatang, pembagian proporsi moda kereta api dan jalan harus berimbang sesuai dengan keunggulan komparatifnya, diantaranya: (1) untuk mengurangi beban jalan pada koridor utama di Jawa dan Sumatera; (2) untuk memberikan akses dari/ke kawasan potensial ke simpul pelabuhan/bandara; (3) untuk menyediakan angkutan massal penumpang di kawasan perkotaan yang aman, nyaman, dan selamat; serta (4) untuk menyeimbangkan kontribusi ekonomi dan penyebaran penduduk ke wilayah lainnya melalui pengembangan jaringan di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua serta skema keperintisan.

2. Konektivitas Transportasi Nasional

Tingginya biaya logistik nasional hingga sekitar 26% dari PDB, merupakan salah satu bukti yang harus diakui bahwa penyediaan jaringan dan sistem layanan transportasi nasional belum mampu menyediakan konektivitas yang efisien dan merata. Pengembangan simpul maupun jaringan layanan di masing-masing moda secara fisik belum direncanakan secara terpadu, adapun dari sisi layanan sistem transportasi intermoda/multimoda belum berkembang sama sekali.

Bahkan sampai dengan saat ini belum ada dokumen resmi tentang rencana pengembangan jaringan transportasi nasional yang terintegrasi di seluruh moda. Masing-masing moda masih merencanakan masterplan/rencana induk/tatanan jaringan yang terpisah-pisah dengan pertimbangan intermodality yang sangat terbatas.

Sebagaimana diinginkan dalam agenda pembangunan nasional, seperti MP3EI (Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011) dan SISLOGNAS (Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2012) bahwa dalam 10 tahun ke depan diharapkan sudah terwujud konektivitas transportasi nasional yang efisien dan handal yang menjangkau seluruh titik NKRI melalui jaringan transportasi intermoda/multimoda yang terintegrasi.

Pembangunan transportasi Jabodetabek dalam empat tahun ke depan perlu mengedepankan konsep konektivitas dalam jaringan intermoda/multimoda yang terintegrasi tersebut yang diejawantahkan dalam kebijakan, regulasi, maupun investasi yang dilakukan baik untuk pelayanan penumpang maupun barang antar kota maupun perkotaan. Apalagi sifat layanan

dari moda kereta api, laut dan udara yang tidak door-to-door mengharuskan adanya integrasi melalui moda jalan sebagai feeder/angkutan lanjutan agar daya saingnya dapat dipertahankan.

3. Transformasi Regulasi dan Kelembagaan

Sebagaimana diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sektor transportasi Indonesia sedang mengalami proses transformasi dari monopoli negara (atau BUMN yang disertai kewenangan sepenuhnya untuk mengelola suatu moda) ke arah pasar yang lebih terbuka bagi peran swasta maupun Pemda. Hal ini ditandai dengan ditetapkan sejumlah undang-undang baru di sektor transportasi pada periode tahun 2004-2009, diantaranya: UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang baru di sektor transportasi tersebut umumnya memperkenalkan kebijakan pemisahan kelembagaan antara operator dengan regulator serta mendorong partisipasi sektor swasta sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan transportasi. Ke depan Pemerintah akan fokus menjalankan fungsinya sebagai regulator dalam membina penyelenggaraan sektor transportasi nasional yang target utamanya adalah menyediakan kebijakan dan regulasi/tata aturan yang baik dan fair sebagai platform/landasan bagi stakeholders terkait untuk bersaing secara sehat dalam penyediaan layanan transportasi, yang pada akhirnya akan dinikmati hasilnya oleh masyarakat melalui kinerja layanan yang lebih baik dan terjangkau.

Proses transisi dalam regulasi dan kelembagaan di sektor transportasi, termasuk di perkeretaapian, harus segera dituntaskan, karena hal ini akan menjadi landasan bagi terwujudnya sistem penyelenggaraan layanan transportasi yang maju, modern, terbuka, dan berdaya saing tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini amanat UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian untuk memisahkan BUP sarana dengan BUP prasarana untuk jalur yang dimiliki oleh Pemerintah belum terlaksana, agenda ini sangat penting untuk dituntaskan dalam 4 (empat) tahun ke depan. Selain itu, amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan moda angkutan lain sehingga perlu untuk memberikan perhatian lebih pada sektor ini.

4. Biaya Logistik Nasional

Pada Tahun 2014, World Bank merilis data bahwa LPI (Logistics Performance Index) Indonesia berada pada ranking 53 dunia, dengan skor 3,08. Sedangkan perkiraan total biaya logistik Indonesia masih sangat tinggi, yakni di atas 25% dari PDB, dengan komposisi 12,04% untuk biaya transportasi, 9,47% untuk biaya persediaan (inventory), dan 4,52% untuk biaya administrasi. Data tersebut menunjukkan bahwa biaya logistik di Indonesia masih relatif tinggi, bahkan jika dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Singapura (8%), Malaysia (13%), dan Thailand (20%).

Moda kereta api memiliki peran penting dalam penurunan biaya logistik nasional, karena daya angkutnya yang besar akan menghasilkan efisiensi dari economic-of-scale jika sistem jaringan kereta api didukung dengan interkoneksinya dengan simpul pelabuhan dan kawasan industri dapat dikembangkan secara optimal. Sementara moda jalan digunakan untuk segmen angkutan barang untuk kapasitas yang tidak terlalu besar dan jarak pendek, khususnya untuk door-to-door service.

Penurunan biaya logistik akan menjadi penentu daya saing Indonesia dalam kancah perekonomian global di mana pasar akan semakin terbuka. Logistik yang murah dan prudent akan memberikan nilai tambah bagi produk nasional, baik dari sisi biaya ataupun kualitas.

5. Konsumsi Energi dan Dampak Lingkungan

Sesuai perhitungan Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, diperkirakan bahwa pada Tahun 2012 sektor transportasi mengkonsumsi BBM bersubsidi sekitar 42 juta KL, dan menyumbang sekitar 60-70% emisi gas rumah kaca (CO₂). Di masa datang isu energi dan lingkungan akan semakin relevan dengan semakin langkanya sumber energi dan menurunnya daya dukung lingkungan untuk menopang berbagai aktivitas dan kebutuhan warga dunia.

Indonesia melalui RAN-GRK (Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011) berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dengan upaya sendiri jika dibandingkan dengan garis dasar pada kondisi BAU (baseline).

Dengan pengintegrasian transportasi perkotaan, antara jalan dengan kereta api yang akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi, diharapkan akan banyak mengurangi tingkat konsumsi BBM dan emisi gas buang baik untuk angkutan penumpang perkotaan maupun angkutan barang antar kota.

Isu Strategis Pengembangan Transportasi Jabodetabek :

1. Tingginya angka kecelakaan di jalan;
2. Pembebanan berlebih pada jalan;
3. Konvergensi kebijakan di bidang angkutan jalan (angkutan umum murah vs mobil murah);
4. Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi;
5. Jumlah dan pelayanan angkutan umum yang belum memadai;
6. Belum tercapainya konektivitas/integrasi;
7. Otonomi daerah;
8. Peningkatan kualitas SDM;
9. Penyelesaian peraturan perundangan.

1.5 Sistematika Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

BAB II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun 2017 yang telah ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan disandingkan dengan pengukuran kinerja berupa capaian yang telah diperoleh selama tahun 2017, yang terdiri dari:

a. Tahapan Pengukuran Kinerja

Berisi tentang tahapan yang dilakukan untuk proses pengukuran kinerja serta metode dalam mencapai target yang ditentukan.

b. Capaian Kinerja Organisasi

Disajikan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan dilakukan analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV : Penutup

Tinjauan secara umum dengan mengemukakan capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

BAB V : Lampiran

Untuk memperjelas Laporan Akuntabilitas Kinerja, dilampirkan perhitungan-perhitungan, gambar dan aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana, metode dan data lain yang relevan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Perencanaan merupakan salah satu empat fungsi manajemen yang penting dan saling terkait satu sama lain. Berbicara tentang perencanaan, kita dihadapkan pada pertanyaan apakah suatu rencana berjalan dengan baik atau tidak. Kesalahan perencanaan dapat berada pada awal perencanaan itu sendiri ataupun pada saat proses perencanaan itu berlangsung.

Dengan adanya perencanaan strategis ini maka konsepsi instansi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana- rencana lain dan dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan strategi dapat menentukan keberhasilan instansi atau organisasi.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017

Rencana Kinerja Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2016 – 2019 yang terdiri dari sasaran, indikator kinerja serta target yang ditetapkan sebelum DIPA tahun anggaran 2017 ditetapkan.

TABEL II. 1 Rencana Kerja Tahun 2017 BPTJ

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
SS1. Meningkatnya peran moda angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek	IK1. <i>Modal share</i> (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek	%	26
SS2. Menurunnya angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di wilayah Jabodetabek	IK2. Persentase penurunan jumlah kecelakaan dengan menggunakan angkutan umum di wilayah Jabodetabek	%	8,9
SS3. Meningkatnya kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek	IK3. Kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek	Km/jam	15
SS4. Meningkatnya kinerja pelaksanaan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ)	IK4. Persentase muatan RITJ yang telah dilaksanakan	%	11
SS5. Meningkatnya cakupan pelayanan angkutan umum di kawasan perkotaan Jabodetabek	IK5. Rasio panjang jalan nasional yang terlayani oleh jaringan angkutan umum perkotaan	%	57

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
SS6. Meningkatnya integrasi antarmoda transportasi di kawasan perkotaan Jabodetabek	IK6. Rasio jumlah fasilitas integrasi antarmoda transportasi yang telah selesai direncanakan	%	7
SS7. Meningkatnya pengawasan atas izin/rekomendasi yang dikeluarkan BPTJ	IK7. Persentase izin/ rekomendasi yang telah diawasi	%	60
SS8. Meningkatnya kinerja peningkatan kompetensi pegawai BPTJ	IK8. Rasio jumlah pegawai BPTJ yang telah mengikuti diklat	%	20
SS9. Tersedianya informasi valid, handal, dan mudah diakses di Lingkungan BPTJ	IK9. Persentase sistem informasi yang telah dikembangkan di lingkungan BPTJ	%	60
SS10. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BPTJ	IK10. Nilai AKIP BPTJ	Nilai	83
SS11. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan BPTJ	IK 11. Prosentase penyerapan anggaran BPTJ	%	90

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Pada konteks implementasi AKIP, Perjanjian Kinerja adalah rencana kinerja tahunan (*annual performance plan*) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2016 – 2019, yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam empat tahun ke depan. Penetapan Kinerja ini untuk merinci dan memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai kurun waktu satu tahun serta untuk mempermudah terkait dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif).

Maksud Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek tahun 2017 adalah untuk mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2016 – 2019, yang memuat 5 (Lima) Sasaran dan 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama.

Adapun perincian dari masing-masing sasaran adalah sebagai Tabel II.2 berikut:

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja BPTJ Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SS1	Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan.	IK1 <i>Modal share</i> (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek.		%	26
		a	Tersediannya konsep perencanaan yang terintegrasi	Dokumen	7
		b	Tersediannya konsep penyiapan naskah akademik kebijakan (NSPK Transportasi)	Dokumen	5
		c	Tersediannya rekomendasi terhadap instansi terkait terhadap kebutuhan pembangunan yang terintegrasi	Dokumen	2
		d	Tersediannya database transportasi	Dokumen	2
		e	Jumlah sarana angkutan umum yang memiliki izin di wilayah Jabodetabek	Unit	33.022
		f	Jumlah kota di Jabodetabek yang telah menerapkan sistem angkutan massal	Kota	3
		g	Pengembangan dan Peningkatan Prasarana Jalan di Wilayah Jabodetabek	Dokumen	7
		h	Pengembangan dan Peningkatan Prasarana Perkeretaapian di Wilayah Jabodetabek	Dokumen	3
SS2	Meningkatkannya keselamatan dan Keamanan Transportasi.	IK2 Persentase penurunan jumlah kecelakaan dengan menggunakan angkutan umum di wilayah Jabodetabek.		%	8,9
		a	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan nasional di jabodetabek		
			- Rambu	%	16,67

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET
		-	Penerangan Jalan	%	17,2
		-	RPPJ	%	23,81
		-	Marka	%	12,27
		-	Warning Light	%	14,22
		-	Cermin Tikung	%	0
		-	Paku Jalan	%	0
		b	Jumlah sarana yang angkutan umum yang laik jalan	%	53
		c	Jumlah ketersediaan sistem monitoring dan pengawasan lalu lintas dan angkutan di Jabodetabek	Kegiatan	3
SS3	Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	IK3 Kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek		Km/jam	15
		a	Jumlah Penerapan MRLL dan ANDALALIN di Jalan Nasional Jabodetabek	Lokasi	22
		b	Jumlah jaringan jalan nasional yang telah dilengkapi dengan sistem ATCS	%	10
		c	Pengembangan dan Peningkatan Integrasi Prasarana di Wilayah Jabodetabek	Dokumen	9
SS4	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi	IK4 Rasio panjang jalan nasional yang terlayani oleh jaringan angkutan umum perkotaan		%	57
		a	Jumlah rute angkutan umum yang telah direstrukturasasi	Rute	2
SS5	Terwujudnya good governance & clean government di Kemenhub	IK5 Nilai AKIP BPTJ		Nilai	83
		a	Jumlah rancangan peraturan perundang undangan yang disusun	Peraturan	5
		b	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan	Laporan	5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	
		c	Jumlah rancangan kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka kerjasama di bidang transportasi	Dokumen	3
		d	Jumlah kegiatan advokasi hukum di bidang transportasi	Kegiatan	1
		e	Jumlah kepesertaan pegawai dalam mengikuti diklat/bimtek sesuai bidangnya	Orang	20
		f	Jumlah pegawai yang memperoleh sertifikat kelulusan mengikuti diklat/bimtek sesuai bidangnya	Orang	20
		g	Pemenuhan kebutuhan layanan perkantoran BPTJ	Tahun	1
		h	Nilai AKIP BPTJ	Nilai	83
		i	Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi di bidang keuangan	Laporan	5
		j	Jumlah laporan evaluasi dan monitoring yang disusun terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran/BMN/PNBP	Laporan	2
		k	Tingkat penyerapan anggaran	%	85
		l	Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi di bidang perencanaan	Laporan	2
		m	Jumlah laporan evaluasi dan monitoring yang disusun terkait bidang perencanaan	Laporan	2
		n	Jumlah penyelegaraan pelayanan informasi publik bagi masyarakat umum	Laporan	1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
		o Jumlah penyelenggaraan kegiatan kehumasan	Kegiatan	2
		p Jumlah kegiatan bersama antar lembaga	Kegiatan	1
		q Jumlah kegiatan teknis yang dapat dikerjakan/dibangun dalam mendukung oprasional	Kegiatan	3
		r Jumlah user yang dapat ditangani	Laporan	1
		s Jumlah pemberitaan melalui portal BPTJ yang dapat dirilis	Laporan	1
		t Jumlah pembangunan aplikasi data dan sistem informasi oleh BPTJ	Aplikasi	3

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Untuk mengukur kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, capaian kinerja pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan rencana tingkat capaian yang telah ditetapkan, sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan dimungkinkan dengan adanya sejumlah deviasi/celah kinerja, sehingga diperlukan strategi perbaikan untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik dimasa mendatang.

3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Untuk mencapai sasaran yang ingin di capai pada tahun 2017 maka Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek melaksanakan sebanyak 108 kegiatan yang tercantum pada POK dan beberapa kegiatan prioritas tambahan sesuai arahan Bapak Menteri Perhubungan dan Kepala BPTJ.

Dalam perhitungan persentase pencapaian rencana digunakan rumus sebagai berikut :

- a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka gunakan rumus :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$= \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 terhadap Target Revisi PK Tahun 2017

Dalam tahap perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan target revisi perjanjian kinerja tahun 2017 perlu diperhatikan cara atau metode pengukuran kinerja, tabel capaian

kinerja yang dibandingkan dengan target kinerja dapat dilihat dalam tabel perbandingan antara target kinerja dan capaian kinerja berikut ini:

TABEL III. 1 Perbandingan Capaian dan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2017

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPTJ	TARGET 2017	CAPAIAN TAHUN 2017	Ket
T1 Mewujudkan pelayanan angkutan umum yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah di wilayah jabodetabek secara berkelanjutan	SS1 Meningkatnya konektivitas angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek	IK1 Cakupan pelayanan angkutan umum di kawasan perkotaan Jabodetabek	57%	48%	Jika diukur dengan area dan populasi, maka coverage jalan diperkirakan 48% dari jumlah populasi
T2 Meningkatkan keselamatan dalam pelayanan angkutan umum di wilayah Jabodetabek	SS2 Menurunnya angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di wilayah Jabodetabek	IK2 Jumlah kecelakaan yang melibatkan moda angkutan umum di wilayah Jabodetabek	8.2%	12,9%	Jumlah penurunan dari data kecelakaan tahun 2016 dan 2017
T3 Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi umum di wilayah Jabodetabek	SS3 Meningkatnya kinerja jaringan jalan di wilayah Jabodetabek	IK3 <i>Travel speed</i> kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek	15 km/ jam	15,781 km/jam	2019 : 25 km/jam (selesainya MRT, KA Bandara, dan Monorel)
T4 Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas, serta integrasi sarana dan prasarana transportasi umum di wilayah Jabodetabek	SS4 Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas sarana, dan integrasi transportasi umum di wilayah Jabodetabek	IK4 Modal Share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek	26%	26%	*Survei dilakukan pada Okt-Nov 2017 pd KRL, dan April-Juni 2017 pd Bus.

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016-2017 Terhadap Target Kinerja Tahun 2016-2017

Pada tahun anggaran 2016 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang masih merupakan organisasi baru belum memiliki anggaran sendiri dikarenakan untuk anggaran yang diberikan masih berada di Biro Umum Sekretariat Jenderal. Oleh karena itu untuk penyusunan dokumen evaluasi masih diserahkan ke Biro Umum sehingga belum bisa

melakukan penilaian kinerja sendiri dan belum dapat melakukan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditentukan.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2017 Dalam Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019

Pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 terdapat 3 sasaran yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam proses pencapaian target tersebut, BPTJ diminta untuk memberi masukan dalam perhitungan capaian yang telah ditargetkan, capaian tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

TABEL III. 2 Perbandingan Capaian Terhadap Target Renstra Kemenhub Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)	TARGET 2017	CAPAIAN TAHUN 2017	Ket
SS1 Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	IK1 Rasio Konektivitas antar wilayah	57%	48%	Jika diukur dengan area dan populasi, maka coverage jalan diperkirakan 48% dari jumlah populasi
SS2 Menurunnya angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di wilayah Jabodetabek	IK2 Jumlah kecelakaan yang melibatkan moda angkutan umum di wilayah Jabodetabek	8.2%	12,9%	Jumlah penurunan dari data kecelakaan tahun 2016 dan 2017
SS3 Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	IK7 Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di Wilayah Jabodetabek	15 km/ jam	15,781 km/jam	2019 : 25 km/jam (selesainya MRT, KA Bandara, dan Monorel)
SS4 Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	IK11 Modal Share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek	26%	26%	*Survei dilakuakn pada Okt-Nov 2017 pd KRL, dan April-Juni 2017 pd Bus.

3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

a. Meningkatnya konektivitas angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek

Pada tahun 2017 untuk capaian cakupan pelayanan angkutan umum di kawasan perkotaan Jabodetabek hanya tercapai 48% dari target yang telah ditetapkan sebesar

57%. Hal tersebut dikarenakan untuk metode pengukuran yang dilakukan dengan area dan populasi sehingga coverage jalan diperkirakan 48% dari jumlah populasi.

- b. Menurunnya angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di wilayah Jabodetabek

Pada tahun 2016 jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum sebanyak 531 kejadian dan pada tahun 2017 sebanyak 462 kejadian. Dari data tersebut pada tahun 2017 telah terjadi penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di wilayah Jabodetabek sebesar 12,9% dari jumlah angka kecelakaan yang terjadi selama tahun 2016.

- c. Meningkatnya kinerja jaringan jalan di wilayah Jabodetabek

Untuk target indikator kinerja utama (IKU) Travel Speed kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek dengan target 15 km/jam dapat tercapai dengan nilai 15,781 km/jam pada tahun 2017. Pada tahun 2019 BPTJ mentargetkan angka 25 km/jam karena diperkirakan pada tahun 2019 moda transportasi MRT, KA Bandara, dan Monorail sudah mulai beroperasi.

- d. Meningkatnya aksesabilitas, kapasitas sarana, dan integrasi transportasi umum di wilayah Jabodetabek

Capaian modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek tercapai 26% sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hasil tersebut didapat dari pelaksanaan survei pengguna KRL pada bulan Oktober dan November 2017 serta pelaksanaan survei pengguna Bus pada bulan April sampai bulan Juni 2017.

3.2.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya

NO	URAIAN TUGAS DAN JABATAN / UNIT KERJA	HASIL KERJA (BK)	BEBAN KERJA / BK/ Th	JAM KERJA / BK	JAM KERJA / BK / Th	JAM KERJA EFEKTIF/Th
1	BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	PROGRAM PENGELOLAAN TRANSPORTASI JABODETABEK	364	1.200	436.800	1.250
JUMLAH TOTAL JAM KERJA EFEKTIF PER TAHUN					436.800	
JUMLAH JAM KERJA EFEKTIF PER PEGAWAI PER TAHUN						1.250
PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI YAITU 436.800 : 1250 x Orang = 349,44 (349 Orang)						

JUMLAH PEGAWAI PEMANGKU JABATAN SAAT INI : 113 PEGAWAI DAN 85 HONORER

JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI STANDAR/TETAP : 349 PEGAWAI

KEKURANGAN PEGAWAI : 236 PEGAWAI

KELEBIHAN PEGAWAI : -

3.2.6 Capaian Keberhasilan Kinerja Unit Kerja Lainnya

a. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan

TABEL III. 3 Capaian Kinerja Direktorat Perencanaan dan Pengembangan

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tercapainya perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan sinergis antar daerah, antar ruang, antar-waktu, antar fungsi pemerintah dengan penganggarannya	Tersedianya dokumen Perencanaan yang terintegrasi	Dokumen	7	7	100
a. Koordinasi Perencanaan Transportasi Jabodetabek		Keg	1	1		
b. Evaluasi Sasaran Pembangunan Transportasi Terintegrasi Jabodetabek		Dokumen	1	1		
c. Penyusunan Metode Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengembangan Transportasi Jabodetabek		Keg	1	1		
d. Pengembangan Peta Interaktif Sistem Informasi Jaringan dan Angkutan Umum Jabodetabek		Dokumen	1	1		
e. Permodelan Sistem Pembayaran Angkutan Umum Terintegrasi		Dokumen	1	1		
f. Perencanaan Teknis Restrukturisasi Pengelolaan Angkutan Kota (Angkot)		Dokumen	1	1		
g. Pengembangan sistem informasi jaringan dan angkutan umum Jabodetabek		Dokumen	1	1		
Tersedianya dokumen penyiapan naskah akademik kebijakan (NSPK Transportasi)		Dokumen	5	5	100	
a. Perencanaan Teknis Skema Pembiayaan Pembangunan TOD di Jabodetabek		Dokumen	1	1		
b. Perencanaan Teknis Skema Pembiayaan Tranjabodetabek		Dokumen	1	1		
c. Perencanaan Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Fasilitas Integrasi		Dokumen	1	1		
d. Perencanaan Teknis Penyusunan Pedoman Pehitungan Subsidi untuk Angkutan Umum di Jabodetabek		Dokumen	1	1		
e. Perencanaan Teknis Penataan Jaringan dan Simpul Angkutan Barang di Jabodetabek		Dokumen	1	1		
2		Meningkatnya Peran BPTJ terkait Koordinasi kebijakan	Tersedianya Rekomendasi terhadap Instansi terkait terhadap kebutuhan pembangunan yang terintegrasi	Dokumen	2	2

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pembangunan transportasi di Jabodetabek	a. Rekomendasi terhadap penerapan e-ticketing dalam penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek	Dokumen	1	1	
		Tersedianya Database Transportasi	Dokumen	2	2	100
		a. Pengembangan database pergerakan penumpang dan barang di Jabodetabek	Dokumen	1	1	
		b. Pengadaan software simulasi pergerakan penumpang pada simpul transportasi	Dokumen	1	1	
		Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan transportasi di Jabodetabek	Dokumen	1	1	100
		a. Evaluasi Kinerja Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Jabodetabek	Keg	1	1	

b. Direktorat Prasarana

TABEL III. 4 Capaian Kinerja Direktorat Prasarana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Perbandingan Realisasi Terhadap Pk (%)	
1	SS3 Meningkatnya kinerja jaringan jalan di Wilayah Jabodetabek	A	IK3 1 Panjang lajur khusus BRT				
		1	DED Pengadaan dan Pemasangan ATCS di Koridor Jalan Raya Bogor dan Jalan Raya Bekasi	Keg	1	1	100
		2	Pengadaan dan Pemasangan ATCS di Koridor Jalan Raya Bogor	Keg	1	1	100
		3	Pengadaan dan Pemasangan ATCS di Koridor Jalan Raya Bekasi	Keg	1	1	100
		4	Pembangunan Pusat Kendali BPTJ Tahap I	Keg	1	1	100
		5	Supervisi Pengadaan dan Pemasangan ATCS di Koridor Jalan Raya Bogor	Keg	1	1	100
		6	Supervisi Pengadaan dan Pemasangan ATCS di Koridor Jalan Raya Bekasi	Keg	1	1	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Perbandingan Realisasi Terhadap Pk (%)
		7	Supervisi Pembangunan Pusat Kendali BPTJ Tahap I	Keg	1	1	100
		8	DED Jalur Khusus Bus di Jalan Nasional di Wilayah Jabodetabek	Keg	1	1	100
		9	DED Halte Transjabodetabek Ekstensi	Keg	1	1	100
2	SS4 Meningkatnya AKSESIBILITAS, KAPASITAS SARANA, dan INTEGRASI transportasi umum di wilayah Jabodetabek	A	IK4 2 Jumlah simpul transportasi antarkota yang terintegrasi dengan angkutan massal Jabodetabek				
		1	Reviu DED Terminal Poris Plawad	Keg	1	1	100
		2	Optimalisasi Pemanfaatan Jalur Kereta Api di Jabodetabek	Keg	1	1	100
		3	Monitoring Dan Evaluasi SPM Terminal Penumpang Angkutan Jalan Di Jabodetabek	Dok	1	1	100
		4	Monitoring dan Evaluasi Stasiun Kereta Api Commuter dan Perlintasan pada lintas KA Bandara	Dok	1	1	100
		5	Pengadaan Peralatan Penunjang Pemantauan SPM Stasiun	Pkt	3	3	100
		6	Pengadaan Alat Pemantau Jarak Jauh	Pkt	2	2	100
		B	IK4 3 Jumlah fasilitas integrasi antarmoda yang dibangun di wilayah Jabodetabek				
		1	DED Fasilitas Integrasi di Stasiun Bojong Gede	Keg	1	1	100
		2	Rencana Teknis Fasilitas Integrasi Sistem Angkutan Umum Massal di Jabodetabek	Keg	4	4	100
		3	Rencana Teknis Konektivitas Stasiun KA di Jabodetabek	Keg	1	1	100
		4	Bimbingan Teknis Perencanaan Integrasi Simpul Transportasi Jabodetabek	Keg	1	1	100

c. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan

TABEL III. 5 Capaian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN REALISASI TERHADAP PK (%)	
1	SS1 Meningkatnya konektivitas angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek	A	IK1 1 Jumlah rute angkutan umum yang telah direstrukturisasi	Rute	2	2	100
		1	Semiloka Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang di Wilayah Jabodetabek	Keg	1	1	100
		2	Sosialisasi Peraturan Menteri terkait Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Massal di Jabodetabek	Keg	1	1	100
		3	Perencanaan Teknis Restrukturisasi Perizinan AKAP Jabodetabek	Dok	1	1	100
		4	Sosialisasi Implementasi Sistem Perizinan Jabodetabek	Keg	1	1	100
2	SS2 Menurunnya angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di wilayah Jabodetabek	A	IK2 1 Jumlah fasilitas perlengkapan jalan nasional di jabodetabek				
		-	Rambu	%	16,67	16,67	100
		-	Penerangan Jalan	%	17,20	17,20	100
		-	RPPJ	%	23,81	23,81	100
		-	Marka	%	12,27	12,27	100
		-	Warning Light	%	14,22	14,22	100
		-	Cermin Tikung	%	0	0	0
		-	Paku Jalan	%	0	0	0
		1	Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan di Jabodetabek	Keg	1	1	100
		2	Pengadaan Alat Uji Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka dan Rambu)	Pkt	1	1	100

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN REALISASI TERHADAP PK (%)	
		B	3	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Nasional Jabodetabek	Pkt	6	6	100
			IK2 2 Jumlah sarana yang angkutan umum yang laik jalan		%	53	45,8	86,47
		C	1	Koordinasi Teknis Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Se-Jabodetabek	Keg	1	1	100
			2	Pengawasan Pelaksanaan RITJ Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah Bekasi, Bogor, Tangerang, DKI Jakarta	Keg	4	4	100
			3	Pengawasan Operasional Terminal Tipe A di Wilayah Jabodetabek	Keg	1	1	100
			4	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Keg	1	1	100
			5	Pengadaan media komunikasi dan sosialisasi serta ruang posko angkutan hari raya Jabodetabek	Pkt	1	1	100
			6	Pengadaan Jaringan Alat Komunikasi di Jabodetabek	Pkt	1	1	100
			7	Pengadaan Kendaraan Khusus Roda 4 Pengawasan LLA	Unit	2	2	100
			IK2 3 Jumlah ketersediaan sistem monitoring dan pengawasan lalu lintas		Keg	3	3	100

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN REALISASI TERHADAP PK (%)
		dan angkutan di Jabodetabek				
		1 Perencanaan Teknis Sistem pengawasan angkutan secara e-enforcement di jalan Nasional Bodetabek	Dok	1	1	100
		2 Pengadaan Peralatan Penunjang Pengawasan Lalu Lintas	Pkt	1	1	100
		3 Pengembangan dan Pengadaan Sistem Aplikasi Monitoring dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jabodetabek	Pkt	1	1	100
3	SS3 Meningkatkan kinerja jaringan jalan di Wilayah Jabodetabekk	A IK3 1 Jumlah Penerapan MRLI dan ANDALALIN di Jalan Nasional Jabodetabek	Lokasi	22	22	100
		1 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Ruas Jalan di Jabodetabek	Keg	1	1	100
		2 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Simpang di Jabodetabek	Keg	1	1	100
		3 Pengadaan Alat Survei Lalu Lintas dan Angkutan	Pkt	1	1	100
		4 Pengadaan Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak	Pkt	1	1	100
		5 Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas	Keg	1	1	100
		6 Pengawasan dan Monitoring Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas	Keg	1	1	100
		7 Rencana Umum Penanganan Bottleneck	Dok	1	1	100

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN REALISASI TERHADAP PK (%)
		Jalan Nasional di Jabodetabek				
		B IK3 2 Jumlah sarana angkutan umum yang memiliki izin di wilayah Jabodetabek	Unit	33.022	16.731	50,67
		1 Pencetakan Blanko Dokumen Perizinan Angkutan Penumpang Umum Tidak Dalam Trayek dan Dalam Trayek	Pkt	2	2	100
		2 Pengadaan Sistem Monitoring Pelayanan Perizinan	Pkt	1	1	100
		3 Pengadaan Peralatan Penunjang Perizinan Angkutan Umum	Pkt	1	1	100
		4 Penataan Perizinan Angkutan Umum Jabodetabek	Keg	1	1	100
		C IK3 3 Jumlah jaringan jalan nasional yang telah dilengkapi dengan sistem ATCS	%	10	10	100
4	SS4 Meningkatkan AKSESIBILITAS, KAPASITAS SARANA, dan INTEGRASI transportasi umum di wilayah Jabodetabek	A IK4 1 Jumlah kota di Jabodetabek yang telah menerapkan sistem angkutan massal	Kota	3	3	100

d. Sekretariat Badan

TABEL III. 6 Capaian Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2017	CAPAIAN 2017
Meningkatnya jumlah regulasi dan sosialisasi di bidang transportasi	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun	Peraturan	5	5
	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan	Laporan	5	3
Meningkatnya jumlah layanan kerjasama Nasional dan Internasional di bidang transportasi serta mengantisipasi adanya permasalahan hukum dari kebijakan yang dikeluarkan	Jumlah rancangan kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka kerjasama di bidang transportasi	Dokumen	3	11
	Jumlah kegiatan advokasi hukum di bidang transportasi	kegiatan	1	0
Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Teknis BPTJ sesuai kebutuhan	Jumlah kepesertaan pegawai dalam mengikuti diklat/bimtek sesuai bidangnya	orang	20	34
	Jumlah pegawai yang memperoleh sertifikat kelulusan mengikuti diklat/bimtek sesuai bidangnya	orang	20	31
Meningkatnya layanan perkantoran	Pemenuhan kebutuhan layanan perkantoran BPTJ	Tahun	1	1
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di Lingkungan BPTJ	Nilai AKIP BPTJ	Nilai	83	42,28
Meningkatnya sistem manajemen perencanaan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi di bidang perencanaan	Laporan	2	2
	Jumlah laporan evaluasi dan monitoring yang disusun terkait bidang perencanaan	Laporan	2	2
Meningkatnya penyampaian informasi publik terkait penyelenggaraan transportasi Jabodetabek kepada stakeholder melalui kegiatan kehumasan	Jumlah penyelenggaraan pelayanan informasi publik bagi masyarakat umum	Laporan	1	0
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan kehumasan	Kegiatan	2	9
Meningkatnya hubungan antar lembaga terkait menjaga citra positif	Jumlah kegiatan bersama antar lembaga	Kegiatan	1	1
Meningkatnya kinerja bidang TIK dalam mendukung	Jumlah kegiatan teknis yang dapat dikerjakan/dibangun dalam mendukung operasional	Kegiatan	3	4

SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2017	CAPAIAN 2017
penyelenggaraan kegiatan BPTJ	Jumlah user yang dapat ditangani	Laporan	1	1
	Jumlah pemberitaan melalui portal BPTJ yang dapat dirilis	Laporan	1	1
	Jumlah pembangunan aplikasi data dan sistem informasi oleh BPTJ	Aplikasi	3	3
	Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi di bidang keuangan	Laporan	5	7
	Jumlah laporan evaluasi dan monitoring yang disusun terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran/BMN/PNBP	Laporan	2	24
	Tingkat penyerapan anggaran	%	85	92,41

3.3 Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2017 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek berhasil melakukan realisasi anggaran sebesar Rp. 111.391.444.258,- (92,48%) dari total anggaran sebesar Rp. 120.444.000.000,- dengan sisa nilai anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 9.052.555.742,- yang terdiri dari sisa kontrak dan transito (sisa kegiatan). Berikut adalah rincian dari realisasi BPTJ pada tahun anggaran 2017:

TABEL III. 7 Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Belanja

UNIT KERJA		PAGU	REALISASI	%	TOTAL SISA DANA	Sisa Kotrak	Transito / Sisa Kegiatan
BPTJ		120.444.000.000	111.391.444.258	92,48	9.052.555.742	620.095.888	8.432.459.854
51	B. Pegawai	18.558.480.000	11.539.402.931	62,18	7.019.077.069	-	7.019.077.069
52	B. Barang	38.516.392.000	36.912.981.016	95,84	1.603.410.984	190.028.199	1.413.382.785
53	B. Modal	63.369.128.000	62.939.060.311	99,32	430.067.689	430.067.689	-
TOTAL		120.444.000.000	111.391.444.258	92,48	9.052.555.742	620.095.888	8.432.459.854

3.3.1 Alokasi Total Anggaran Tahun 2017

Pada tahun anggaran 2017 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 120.444.000.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di 4 Unit Eselon II antara lain Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan, Direktorat Prasarana, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan, Sekretariat BPTJ. Total alokasi anggaran tahun 2017 dibagi menjadi tiga jenis belanja dengan pembagian alokasi belanja dengan prosentase sebagai berikut:

TABEL III. 8 Alokasi Beanja Berdasarkan Jenis Belanja

NO	JENIS BELANJA	RUPIAH (Rp. 000)	PROSENTASE (%)
1	Belanja Pegawai	18.558.480	15,41
2	Belanja Barang	38.516.392	31,98
3	Belanja Modal	63.369.128	52,61
TOTAL		120.444.000	100,00

TABEL III. 9 Alokasi Anggaran Berdasarkan Unit Kerja Eselon II

NO	PROGRAM	RUPIAH (Rp. 000)	PROSENTASE (%)
1	Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jabodetabek	29.093.990.000	24,16
2	Pengelolaan Prasarana Transportasi Jabodetabek	27.327.361.000	22,69
3	Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Jabodetabek	11.899.113.000	9,88
4	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BPTJ	52.123.536.000	43,28
TOTAL		120.444.000	100,00

3.3.2 Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Jumlah anggaran yang tidak terserap oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek adalah sebesar Rp. 9.052.555.742,- yang terdiri dari sisa kontrak dan sisa kegiatan (transito). Untuk secara keseluruhan kegiatan BPTJ telah berhasil dilaksanakan sehingga tidak terdapat sisa anggaran yang berasal dari kegiatan yang tidak dilaksanakan. Untuk rincian dana yang tidak terserap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL III. 10 Dana Tidak Terserap Tahun Anggaran 2017

UNIT KERJA	PAGU	TOTAL SISA DANA	SISA ANGGARAN TIDAK TERSERAP	
			Sisa Kotrak	Transito / Sisa Kegiatan
BPTJ	120.444.000.000	9.052.555.742	620.095.888	8.432.459.854
51	B. Pegawai	18.558.480.000	7.019.077.069	-
52	B. Barang	38.516.392.000	1.603.410.984	190.028.199
53	B. Modal	63.369.128.000	430.067.689	430.067.689
TOTAL	120.444.000.000	9.052.555.742	620.095.888	8.432.459.854

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di dalam menyusun dan melaksanakan program kerja tahun 2017 mengacu pada visi dan misi Kementerian Perhubungan, tugas pokok dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Untuk menjabarkan visi dan misi telah disusun rencana strategis yang berisi antara lain kebijakan pembangunan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), sasaran, strategi yang ditempuh, program dan kegiatan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Tahun 2016 s.d 2019.

4.1.1 Pencapaian Kinerja Unit Kerja

a. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan

1. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut guna mencapai Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada tahun 2017 di Wilayah Jabodetabek sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2017-2019 dan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.
2. Dari hasil Analisa efisiensi Sumber Daya, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan masih kekurangan pegawai untuk pelaksanaan kegiatan.
3. Hasil rata-rata capaian kinerja kegiatan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan BPTJ sebesar 100%.
4. Hasil rata-rata capaian keuangan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan pada Tahun 2017 sebesar 99.61%.

b. Direktorat Prasarana

1. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut guna mencapai Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Prasarana pada tahun 2017 di Wilayah Jabodetabek sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2017-2019 dan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.
2. Dari hasil Analisa efisiensi Sumber Daya, Direktorat Prasarana masih kekurangan pegawai sejumlah 32 (tiga puluh dua) orang dengan jumlah pegawai saat ini hanya 29 (dua puluh sembilan) orang dimana jumlah tersebut termasuk pramubakti (honoror).
3. Kegiatan pada Direktorat Prasarana BPTJ T.A 2017 terbagi pada 3 (tiga) Sub Direktorat, yakni Sub Direktorat Prasarana Jalan, Sub Direktorat Prasarana Perkeretaapian, dan Sub Direktorat Integrasi Prasarana.
4. Hasil rata-rata capaian kinerja kegiatan Direktorat Prasarana BPTJ sebesar 99,45%.

5. Hasil rata-rata capaian keuangan Direktorat Prasarana pada Tahun 2017 sebesar 99,45% atau sebesar Rp. 26.815.441.630,- dari total pagu T.A 2017 sebesar Rp. 26.963.976.000,-
- c. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan
1. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut guna mencapai Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada tahun 2017 di Wilayah Jabodetabek sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2017-2019 dan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.
 2. Dari hasil Analisa efisiensi Sumber Daya, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan masih kekurangan pegawai sejumlah 23 (dua puluh tiga) orang dengan jumlah pegawai saat ini hanya 38 (tiga puluh delapan) orang dimana jumlah tersebut termasuk pramubakti (honorar)
 3. Kegiatan pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan BPTJ T.A 2017 terbagi pada 3 (tiga) Sub Direktorat, yakni Sub Direktorat Angkutan, Sub Direktorat Manajemen Lalu Lintas, dan Sub Direktorat Pengawasan Lalu Lintas
 4. Hasil rata-rata capaian kinerja kegiatan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan BPTJ sebesar 98,42%.
 5. Hasil rata-rata capaian keuangan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan pada Tahun 2017 sebesar 97,23% atau sebesar Rp. 29.007.715.971,- dari total pagu T.A 2017 sebesar Rp. 29.835.588.000,-
- d. Sekretariat Badan
1. Realisasi anggaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun anggaran 2017 mencapai angka persentase 92,41% angka tersebut telah mencapai dari angka yang ditargetkan yakni 85%. Selain itu realisasi anggaran BPTJ merupakan peringkat 2 terbaik se-Kementerian Perhubungan setelah Inspektorat Jenderal.
 2. Telah tersusunnya Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan di wilayah Jabodetabek.
 3. Pelaksanaan Focus Group Discussion yang dilakukan untuk memberikan sosialisasi dalam penyelesaian/penanganan suatu kebijakan terkait transportasi di wilayah Jabodetabek.
 4. Pelaksanaan penerimaan CPNS formasi 2017 BPTJ telah menerima sebanyak 10 formasi untuk mengisi kebutuhan pegawai di Direktorat maupun Sekretariat.

4.1.2 Prestasi Unit Kerja Tahun 2017

Selama pelaksanaan anggaran tahun 2017 yang telah dilakukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek telah tercapai beberapa prestasi yang telah dihasilkan untuk memberikan pelayanan di bidang transportasi yang lebih baik kepada masyarakat antara lain sebagai berikut:

TABEL IV. 1 Capaian Sub Sektor BPTJ

No	Kegiatan	CAPAIAN 2017
1	PENGEMBANGAN ANGKUTAN PEMUKIMAN (JRConnexion)	13 KAWASAN
2	PEMBANGUNAN AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS)	2 Koridor Tahap I
3	PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN NASIONAL JABODETABEK	6 RUAS
4	INTEGRASI SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL (SAUM)	Masterplan TOD Dukuh Atas
5	PELAYANAN ANGKUTAN PREMIUM BANDARA	92 Armada melayani 6 Rute
6	LAJUR KHUSUS ANGKUTAN UMUM (LKAU)	3 TRAYEK
7	PERIZINAN ANGKUTAN SEWA ONLINE	200 UNIT

- a. Pengembangan angkutan pemukiman (JRConnexion) yang telah melayani 13 Kawasan sebagai bangkitan perjalanan menuju ke pusat kegiatan atau tarikan perjalanan.
- b. Pembangunan Air Traffic Control System (ATCS) Tahap I di 2 (dua) koridor ruas jalan Nasional antara lain koridor Bogor dan Bekasi.
- c. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan pada 6 ruas jalan Nasional telah diselesaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menekan angka kecelakaan.
- d. Integrasi Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) telah dilakukan pada tahap masterplan Transit Oriented Development (TOD) di kawasan Dukuh Atas.
- e. Pelayanan angkutan premium bandara telah berhasil mengeluarkan ijin operasi kepada 92 armada yang dibagi untuk melayani 6 rute.
- f. Lajur Khusus Angkutan Umum (LKAU) telah dioperasikan untuk melayani 3 rute trayek sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi waktu perjalanan yang ditempuh untuk ke tempat tujuan.
- g. Perizinan angkutan sewa online dilaksanakan dengan telah dikeluarkannya izin operasi sebanyak 200 unit kendaraan.

4.2 Saran Tindak Lanjut

4.2.1 Perencanaan Kinerja

Dalam proses perencanaan kinerja perlu diperhatikan terkait kewenangan yang dapat dijalankan sehingga dalam proses penentuan indikator kinerja dapat diukur dengan hasil dari pelaksanaan kegiatan dan target yang ditentukan dapat dicapai.

4.2.2 Pengukuran Kinerja

Dalam tahap pengukuran kinerja perlu dilakukan analisis terlebih dahulu terkait metode pengukuran yang akan dilakukan sehingga hasil pengukuran yang berupa output dapat sesuai dengan hasil yang telah ditargetkan.

4.2.3 Pelaporan Kinerja

Untuk proses pelaporan kinerja hendaknya dilakukan dengan format yang telah disepakati sehingga dalam pengumpulan data sudah dilakukan dengan format maupun muatan yang didalam dokumen pelaporan.

4.2.4 Evaluasi Kinerja

Apabila terdapat capaian kinerja yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan maka perlu dilakukan kajian ulang terkait metode pengumpulan data maupun cara pelaksanaan sehingga hasil yang dicapai dapat sesuai dengan target yang telah ditentukan.

4.2.5 Capaian Kinerja

Untuk mendapat capaian kinerja yang lebih optimal maka perlu dilakukan penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan pegawai yang telah diperhitungkan menurut analisis beban kinerja dari Bagian Kepegawaian dan Umum.

BAB V
LAMPIRAN

5.1 Lampiran I Capaian Tahun 2017

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPTJ	TARGET 2017	CAPAIAN TAHUN 2017	Ket
T1 Mewujudkan pelayanan angkutan umum yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah di wilayah jabodetabek secara berkelanjutan	SS1 Meningkatnya konektivitas angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek	IK1 Cakupan pelayanan angkutan umum di kawasan perkotaan Jabodetabek	57%	48%	Jika diukur dengan area dan populasi, maka coverage jalan diperkirakan 48% dari jumlah populasi
T2 Meningkatnya keselamatan dalam pelayanan angkutan umum di wilayah Jabodetabek	SS2 Menurunnya angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di wilayah Jabodetabek	IK2 Jumlah kecelakaan yang melibatkan moda angkutan umum di wilayah Jabodetabek	8.2%	12,9%	Jumlah penurunan dari data kecelakaan tahun 2016 dan 2017
T3 Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi umum di wilayah Jabodetabek	SS3 Meningkatnya kinerja jaringan jalan di wilayah Jabodetabek	IK3 <i>Travel speed</i> kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek	15 km/jam	15,781 km/jam	2019 : 25 km/jam (selesainya MRT, KA Bandara, dan Monorel)
T4 Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas, serta integrasi sarana dan prasarana transportasi umum di wilayah Jabodetabek	SS4 Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas sarana, dan integrasi transportasi umum di wilayah Jabodetabek	IK4 Modal Share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek	26%	26%	*Survei dilakukan pada Okt-Nov 2017 pd KRL, dan April-Juni 2017 pd Bus.

5.2 Lampiran II Peraturan Perundangan yang Dilegalkan Tahun 2017 (jika diperlukan)

5.3 Lampiran III Rekapitulasi Realisasi Daya Serap Per Triwulan Tahun Anggaran 2017

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Output	Triwulan I					
			Januari		Februari		Maret	
			Realiasi	Progres	Realiasi	Progres	Realiasi	Progres
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
10 Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	4988 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4988.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Layanan)	100.750.000	4,88	474.575.760	7,32	1.100.963.830	4,88
	4988 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4988.951 Layanan Internal (Overhead) (Paket)	-	4,17	-	50,00	2.399.335.506	29,17
	4988 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4988.994 Layanan Perkantoran (Bulan)	472.481.002	8,33	1.334.046.553	8,33	1.305.251.757	8,34
	4989 Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Jabodetabek	4989.001 Layanan Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Jabodetabek (Kegiatan)	-	0,00	178.111.160	0,00	142.999.420	0,00
	4990 Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jabodetabek	4990.001 Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jabodetabek (Kegiatan)	-	0,00	-	0,00	105.753.445	0,32
	4991 Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek	4991.001 Layanan Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek (Kegiatan)	196.400.000	2,50	116.540.000	7,50	1.034.637.400	40,00
Total			769.631.002	19,88	2.103.273.473	73,15	6.088.941.358	82,71

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Output	Triwulan II					
			April		Mei		Juni	
			Realiasi	Progres	Realiasi	Progres	Realiasi	Progres
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
10 Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	4988 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4988.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Layanan)	1.071.096.951	7,32	1.399.350.422	4,88	1.701.885.931	7,32
	4988 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4988.951 Layanan Internal (Overhead) (Paket)	1.842.218.925	8,33	-	0,00	90.057.000	0,00
	4988 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4988.994 Layanan Perkantoran (Bulan)	2.378.427.313	8,33	1.528.595.406	8,33	2.392.729.076	8,34
	4989 Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Jabodetabek	4989.001 Layanan Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Jabodetabek (Kegiatan)	626.235.000	0,00	100.588.200	0,00	1.107.074.140	0,00
	4990 Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jabodetabek	4990.001 Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jabodetabek (Kegiatan)	124.094.750	0,00	78.640.000	8,33	49.680.000	0,00
	4991 Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek	4991.001 Layanan Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek (Kegiatan)	231.323.800	0,00	3.924.515.677	5,00	1.652.303.718	17,50
Total			6.273.396.739	23,98	7.031.689.705	26,54	6.993.729.865	33,16

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Output	Triwulan III					
			Juli		Agustus		September	
			Realiasi	Progres	Realiasi	Progres	Realiasi	Progres
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
10 Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	4988 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4988.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Layanan)	597.925.000	9,75	1.352.133.662	9,75	1.090.100.907	9,75
	4988 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4988.951 Layanan Internal (Overhead) (Paket)	107.800.000	0,00	-	8,33	12.628.000	0,00
	4988 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4988.994 Layanan Perkantoran (Bulan)	2.591.859.409	8,33	1.888.193.918	8,33	2.254.830.700	8,34
	4989 Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Jabodetabek	4989.001 Layanan Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Jabodetabek (Kegiatan)	1.032.735.750	0,00	750.171.790	0,00	3.080.253.045	13,33
	4990 Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jabodetabek	4990.001 Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jabodetabek (Kegiatan)	325.187.500	0,00	730.297.400	0,00	4.538.214.633	0,00
	4991 Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek	4991.001 Layanan Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek (Kegiatan)	5.190.358.970	0,00	3.608.114.777	5,00	6.960.660.969	0,00
Total			9.845.866.629	18,08	8.328.911.547	31,41	17.936.688.254	31,42

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Output	Triwulan IV					
			Oktober		November		Desember	
			Realiasi	Progres	Realiasi	Progres	Realiasi	Progres
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
10 Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	4988 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4988.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Layanan)	1.399.465.057	12,20	1.648.947.110	9,75	2.556.982.290	12,20
	4988 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4988.951 Layanan Internal (Overhead) (Paket)	247.500.000	0,00	155.160.000	0,00	-	0,00
	4988 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4988.994 Layanan Perkantoran (Bulan)	2.782.417.180	8,33	2.728.221.435	8,33	3.084.740.771	8,34
	4989 Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Jabodetabek	4989.001 Layanan Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Jabodetabek (Kegiatan)	1.551.171.365	26,67	1.847.576.530	26,67	1.050.111.725	33,33
	4990 Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jabodetabek	4990.001 Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jabodetabek (Kegiatan)	3.343.308.940	0,00	7.084.146.298	16,35	10.357.901.838	75,00
	4991 Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek	4991.001 Layanan Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek (Kegiatan)	2.373.093.015	0,00	1.282.212.825	0,00	2.437.554.820	22,50
Total			11.696.955.557	47,20	14.746.264.198	61,10	19.487.291.444	151,37

5.4 Lampiran IV Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
SS1. Meningkatnya peran moda angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek	IK1. <i>Modal share</i> (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek	%	26
SS2. Menurunnya angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di wilayah Jabodetabek	IK2. Persentase penurunan jumlah kecelakaan dengan menggunakan angkutan umum di wilayah Jabodetabek	%	8,9
SS3. Meningkatnya kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek	IK3. Kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek	Km/jam	15
SS4. Meningkatnya kinerja pelaksanaan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ)	IK4. Persentase muatan RITJ yang telah dilaksanakan	%	11
SS5. Meningkatnya cakupan pelayanan angkutan umum di kawasan perkotaan Jabodetabek	IK5. Rasio panjang jalan nasional yang terlayani oleh jaringan angkutan umum perkotaan	%	57
SS6. Meningkatnya integrasi antarmoda transportasi di kawasan perkotaan Jabodetabek	IK6. Rasio jumlah fasilitas integrasi antarmoda transportasi yang telah selesai direncanakan	%	7
SS7. Meningkatnya pengawasan atas izin/rekomendasi yang dikeluarkan BPTJ	IK7. Persentase izin/rekomendasi yang telah diawasi	%	60
SS8. Meningkatnya kinerja peningkatan kompetensi pegawai BPTJ	IK8. Rasio jumlah pegawai BPTJ yang telah mengikuti diklat	%	20
SS9. Tersedianya informasi valid, handal, dan mudah diakses di Lingkungan BPTJ	IK9. Persentase sistem informasi yang telah dikembangkan di lingkungan BPTJ	%	60
SS10. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BPTJ	IK10. Nilai AKIP BPTJ	Nilai	83
SS11. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan BPTJ	IK 11. Prosentase penyerapan anggaran BPTJ	%	90

5.5 Lampiran V Perjanjian Kerja Tahun 2017

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
Mewujudkan pelayanan angkutan umum yang HANDAL, BERDAYA SAING, dan memberikan NILAI TAMBAH dalam rangka mewujudkan KONEKTIVITAS wilayah Jabodetabek secara BERKELANJUTAN	Meningkatnya konektivitas angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek	Cakupan pelayanan angkutan umum di kawasan perkotaan Jabodetabek	%	57
Meningkatkan KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi di wilayah Jabodetabek	Menurunnya angka kecelakaan yg melibatkan angkutan umum di wilayah Jabodetabek	Jumlah kecelakaan yg melibatkan moda angkutan umum di wilayah Jabodetabek	%	8,9
Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi umum di wilayah Jabodetabek	Meningkatnya kinerja jaringan jalan di Wilayah Jabodetabek	Kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek	Km/jam	15
Meningkatkan AKSESIBILITAS, KAPASITAS, serta INTEGRASI sarana dan prasarana transportasi umum di wilayah Jabodetabek	Meningkatnya AKSESIBILITAS, KAPASITAS SARANA, dan INTEGRASI transportasi umum di wilayah Jabodetabek	Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek	%	26

5.6 Lampiran VI Perjanjian Kerja Revisi Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	
SS1	Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan	IK1 <i>Modal share</i> (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek	%	26	
		a	Tersediannya konsep perencanaan yang terintegrasi	Dokumen	7
		b	Tersediannya konsep penyiapan naskah akademik kebijakan (NSPK Transportasi)	Dokumen	5
		c	Tersediannya rekomendasi terhadap instansi terkait terhadap kebutuhan pembangunan yang terintegrasi	Dokumen	2
		d	Tersediannya database transportasi	Dokumen	2
		e	Jumlah sarana angkutan umum yang memiliki izin di wilayah Jabodetabek	Unit	33.022
		f	Jumlah kota di Jabodetabek yang telah menerapkan sistem angkutan massal	Kota	3
		g	Pengembangan dan Peningkatan Prasarana Jalan di Wilayah Jabodetabek	Dokumen	7
		h	Pengembangan dan Peningkatan Prasarana Perkeretaapian di Wilayah Jabodetabek	Dokumen	3
SS2	Meningkatkannya keselamatan dan Keamanan Transportasi	IK2 Persentase penurunan jumlah kecelakaan dengan menggunakan angkutan umum di wilayah Jabodetabek	%	8,9	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET
		a	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan nasional di jabodetabek		
			Rambu	%	16,67
			Penerangan Jalan	%	17,2
			RPPJ	%	23,81
			Marka	%	12,27
			Warning Light	%	14,22
			Cermin Tikung	%	0
			Paku Jalan	%	0
		b	Jumlah sarana yang angkutan umum yang laik jalan	%	53
		c	Jumlah ketersediaan sistem monitoring dan pengawasan lalu lintas dan angkutan di Jabodetabek	Kegiatan	3
SS3	Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	IK3 Kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek		Km/jam	15
		a	Jumlah Penerapan MRLL dan ANDALALIN di Jalan Nasional Jabodetabek	Lokasi	22
		b	Jumlah jaringan jalan nasional yang telah dilengkapi dengan sistem ATCS	%	10
		c	Pengembangan dan Peningkatan Integrasi Prasarana di Wilayah Jabodetabek	Dokumen	9
SS4	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi	IK4 Rasio panjang jalan nasional yang terlayani oleh jaringan angkutan umum perkotaan		%	57

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET
		a	Jumlah rute angkutan umum yang telah direstrukturisasi	Rute	2
SS5	Terwujudnya good governance & clean government di Kemenhub	IK5 Nilai AKIP BPTJ		Nilai	83
		a	Jumlah rancangan peraturan perundang undangan yang disusun	Peraturan	5
		b	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan	Laporan	5
		c	Jumlah rancangan kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka kerjasama di bidang transportasi	Dokumen	3
		d	Jumlah kegiatan advokasi hukum di bidang transportasi	Kegiatan	1
		e	Jumlah kepesertaan pegawai dalam mengikuti diklat/bimtek sesuai bidangnya	Orang	20
		f	Jumlah pegawai yang memperoleh sertifikat kelulusan mengikuti diklat/bimtek sesuai bidangnya	Orang	20
		g	Pemenuhan kebutuhan layanan perkantoran BPTJ	Tahun	1
		h	Nilai AKIP BPTJ	Nilai	83
		i	Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi untuk memenuhi kebutuhan administrasi di bidang keuangan	Laporan	5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	
		j	Jumlah laporan evaluasi dan monitoring yang disusun terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran/BMN/PNBP	Laporan	2
		k	Tingkat penyerapan anggaran	%	85
		l	Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi di bidang perencanaan	Laporan	2
		m	Jumlah laporan evaluasi dan monitoring yang disusun terkait bidang perencanaan	Laporan	2
		n	Jumlah penyelegaraan pelayanan informasi publik bagi masyarakat umum	Laporan	1
		o	Jumlah penyelenggaraan kegiatan kehumasan	Kegiatan	2
		p	Jumlah kegiatan bersama antar lembaga	Kegiatan	1
		q	Jumlah kegiatan teknis yang dapat dikerjakan/dibangun dalam mendukung oprasional	Kegiatan	3
		r	Jumlah user yang dapat ditangani	Laporan	1
		s	Jumlah pemberitaan melalui portal BPTJ yang dapat dirilis	Laporan	1
		t	Jumlah pembangunan aplikasi data dan sistem informasi oleh BPTJ	Aplikasi	3